

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Politik uang atau yang acapkali disebut sebagai korupsi elektoral merupakan fenomena yang marak terjadi dalam pesta demokrasi (pemilu) di Indonesia. Sejarah mencatat, istilah politik uang mulai bermunculan pada pemilu tahun 2004, dimana hal ini menandai bahwa nilai-nilai demokrasi semakin meluntur dibanding pemilu terbaik yang pernah dilaksanakan pada tahun 1955 (Satria, 2019). Selain itu, fenomena ini juga marak terjadi pada pemilihan lokal terutama pada Pilkada terakhir yang dilaksanakan serentak pada tahun 2020. Salah satu anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Pettalo menyampaikan dalam (Ardianto, 2020) bahwa terdapat 262 kasus dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi di Indonesia dimana 65 kasus temuan Bawaslu dan 197 laporan dari masyarakat. Fenomena yang serupa juga terjadi pada pilkada Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dimana terlapor kasus dugaan politik uang sebanyak Rp. 1,5 miliar berupa pecahan Rp. 100 ribuan pada tim sukses paslon nomor urut 2 yakni Sri Muslimatun dan Amin Purnama (Hadi, 2019).

Maraknya fenomena politik uang di Indonesia yang terjadi pada pelaksanaan pemilu maupun pilkada nampaknya menjadi sebuah hal yang wajar terjadi karena secara frekuensi selalu terulang setiap 5 tahun sekali. Praktik yang tumbuh subur di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang ini menandakan bahwa masih minimnya pemahaman atau kesadaran politik masyarakat. Terlebih lagi, praktik tersebut dapat disebut sebagai bentuk “penindasan” sebagai hubungan patron klien antara calon yang dipilih dengan calon pemilih (Abhipraya et al., 2020). Jika ditinjau lebih dalam, kelompok masyarakat yang rentan terlibat praktik politik uang salah satunya adalah kelompok marjinal (Setiadi, 2018). Kelompok marjinal adalah masyarakat kelas bawah yang terpinggirkan seperti gelandangan, kelompok

buruh, miskin, anak jalan dan lainnya dimana mereka mengalami tekanan sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik yang mengakibatkan mereka memiliki keterbatasan dalam wawasan dan pengetahuan. Sehingga, hal tersebut membuat mereka kurang memiliki pemahaman terhadap politik dan menyebabkan kelompok marginal sebagai pemilih yang rentan untuk menjadi sasaran bagi-bagi uang atau sembako sebagai produk dari tindakan politik uang (Dharmawan, 2013).

Dalam konteks politik uang, beberapa kelompok marginal yang rentan terlibat transaksi politik uang adalah umumnya mereka yang memiliki kondisi ekonomi yang sulit, berkebutuhan khusus serta mereka yang mudah dijangkau di tempat umum seperti lampu lalu lintas, warung-warung pinggir jalan hingga pasar. Oleh karena itu, kelompok marginal yang dimaksud disini adalah perempuan, kelompok difabel serta kelompok waria (Suparyanto, 2022). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati dalam (Sucahyo, 2023), perempuan yang umumnya berada di pedesaan dan menjadi Ibu Rumah Tangga (IRT) rentan terpengaruhi praktik politik uang apalagi berkaitan dengan persoalan ekonomi keluarga, contohnya adalah kebutuhan sembako. Kemudian untuk kelompok difabel, memang secara umum yang menjadi tantangan atau permasalahan menjelang pemilu atau pilkada adalah kurangnya penjangkauan pemilih difabel secara administratif, pemenuhan akses khusus pemilih difabel, serta belum maksimalnya pendidikan politik bagi pemilih difabel yang tentu berpotensi menjadi korban politik uang juga (Amrurrobi et al., 2021).

Dan yang terakhir, kelompok waria mengaku pesimistis untuk menggunakan hak pilih mereka karena rentan terkena diskriminasi dan penindasan termasuk oleh praktik politik uang juga akibat minimnya pemahaman mereka terhadap, padahal mereka memiliki hak yang sama juga sebagai warga negara (Kompas.com, 2009). Dari ketiga kelompok marginal di atas, di Kabupaten Sleman sendiri hingga saat ini secara jumlah pemilih kelompok

perempuan lebih banyak di banding kelompok pria yakni 400.768 orang dari total 777.802 orang (Utantoro, 2022). Untuk pemilih difabel, menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 4.272 pemilih disabilitas tersebar di 17 kapanewon se-Kabupaten Sleman pada Pilkada 2020, dan hal tersebut memiliki probabilitas penambahan jumlah di Pemilu 2024 nanti (Raharjo, 2022). Sama halnya dengan difabel, pemilih waria juga memiliki peluang penambahan jumlah melihat *database* LSM Kebaya per-Desember 2012, jumlah waria di Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 234 orang yang tersebar di beberapa wilayah, dimana Kabupaten Sleman paling banyak (Irene, 2023).

Melihat masih rentannya kelompok marjinal di Kabupaten Sleman untuk terjerat dalam tindakan politik uang karena kurangnya kesadaran dan pemahaman politik mereka, maka perlu diberikannya sosialisasi atau pendidikan politik kepada mereka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di berbagai provinsi dan kota/kabupaten di Indonesia (LandasanTeori.com, n.d.). KPU sebagai lembaga independen memiliki peranan penting dalam memberikan sosialisasi politik, hal ini ditegaskan dalam UU Pemilu No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada pasal 8 ayat (1) huruf q: melaksanakan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkenaan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Dimana sosialisasi politik itu sendiri bertujuan untuk memberikan pendidikan politik dalam menumbuhkan kesadaran politik, partisipasi politik, serta budaya demokratis di kehidupan masyarakat.

Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana model atau upaya KPU Kabupaten Sleman dalam memberikan pendidikan pemilih terhadap kelompok marjinal. Alasan mengapa KPU Kabupaten Sleman dipilih sebagai sasaran penelitian karena KPU Kabupaten Sleman menjadi yang pertama merangkul komunitas-komunitas marjinal mulai dari kelompok perempuan, difabel hingga waria dalam pemberian pendidikan atau sosialisasi politik. Uniknya, KPU Kabupaten Sleman tidak hanya mendorong mereka untuk

berpartisipasi menggunakan hak pilihnya tetapi juga menggunakan hak untuk dipilih. Hal tersebut dibuktikan dengan terbitnya buku pedoman pendidikan politik berjudul “Model Pemilu 2014 Bagi Kaum Marjinal” yang diinisiasi oleh salah satu Komisioner KPU Kabupaten Sleman serta ditulis oleh (Usman, 2014). Selain itu, penelitian ini sesuai dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) tujuan ke-4 tentang *Quality Education*/pendidikan berkualitas khususnya tentang politik pada kelompok marjinal serta tujuan ke-11 tentang *Sustainable Cities and Communities*/kota dan komunitas yang berkelanjutan yang dalam hal ini adalah Kabupaten Sleman, DIY serta sesuai juga dengan delapan bentuk kegiatan pembelajaran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 khususnya pada bentuk kegiatan penelitian atau riset.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut: “*Bagaimana model pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sleman terhadap kelompok marjinal?*”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adanya tuntutan pelaksanaan pemilu yang demokratis, terbebas dari pelanggaran pemilu termasuk praktik politik uang serta pemerataan pemahaman dan kesadaran politik bagi masyarakat luas termasuk kelompok marjinal. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana model pendidikan pemilih yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sleman dalam meningkatkan kesadaran politik kelompok marjinal.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Terdapat dua manfaat dari penelitian ini yakni:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis dapat memberikan sumbangsih ilmiah dalam bidang Ilmu Politik dan Pemerintahan yakni sebagai bahan referensi dan evaluasi bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memaksimalkan wewenang dalam pemberian pendidikan

politik yang inklusif atau menyeluruh termasuk kelompok marginal. Selain itu, KPU Kabupaten Sleman yang menjadi *pilot project* dalam hal ini dapat menjadi contoh bagi KPU di seluruh daerah Indonesia agar dapat mengimplementasikan pendidikan politik bagi kelompok marginal.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini secara praktis dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik bagi masyarakat khususnya kelompok marginal. Melalui pemahaman dan kesadaran ini, kelompok marginal secara praktis dapat berpartisipasi dan berkontribusi dengan maksimal dalam pelaksanaan Pemilu, termasuk tidak terlibat dengan praktik-praktik pelanggaran pemilu seperti politik uang. Sehingga, hal tersebut dapat menyongsong kelancaran dan keberlangsungan Pemilu mendatang yakni Pemilu 2024 nanti.

#### 1.5 Tinjauan Pustaka

**Table 1. Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
1	Kurniawan & Hermawan	Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia	Secara sosiologis, praktik politik yang dapat dicegah dengan memberikan pemahaman dari sisi kognitif dan afektif kepada pemilih. Perlu ditanamkan pada benak mereka bahwa bantuan barang atau pemberian uang yang merupakan produk dari politik uang adalah sebuah kejahatan pelanggaran etika serta moral yang mendasar (R. C. Kurniawan & Hermawan, 2019).
2	Satria	Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia	Secara hukum, tindakan pidana politik uang yang diatur dalam pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memiliki kesamaan elemen <i>actus reus</i> dan <i>mens rea</i> yang dirumuskan pada pola <i>indefinite sentence</i> . Selain itu, tindak pidana politik uang juga dapat diatasi dengan menggunakan doktrin pencegahan kejahatan perspektif kriminologi (Satria, 2019).

3	Asmawi, Amiludin & Sofwan	Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang	Dalam mengatasi praktik politik uang di Kabupaten Serang, Bawaslu mengupayakan dua strategi yakni sosialisasi kepada masyarakat dan partai politik serta melakukan patrol anti politik uang selama masa tenang yang sering terjadi dalam tim kesuksesan (Asmawi et al., 2021).
4	Edward, Pahlevi & Amrullohi	Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa	Masyarakat di 34 desa di Daerah Istimewa Yogyakarta juga turut andil dalam melakukan pencegahan politik uang. Yakni dengan pendidikan politik yang dikemas dengan konsep per-emptif yaitu pendeklarasian Desa Anti-Politik Uang serta konsep preventif yaitu Tim Desa Anti-Politik Uang membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang menyaksikan transaksi politik uang secara langsung (Edward et al., 2019).
5	Triono	Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik	Pendidikan politik menjadi sarana sosialisasi politik yang bertujuan untuk membangun kesadaran dan pengetahuan politik masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Pendidikan politik ini tentu menjadi tanggungjawab pemerintah khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Triono, 2017).
6	Purnawati	Pendidikan Politik Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat (Studi di Kantor KPU Kabupaten Tulungagung)	Pemberian sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tulungagung memiliki keberagaman bentuk, mulai dari yang formal melalui santiaji atau kaderasi politik dan ceramah politik serta yang informal melalui pendidikan sekolah dan lingkungan keluarga atau teman. Kunci keberhasilan dalam sosialisasi politik agar dapat menghasilkan pemahaman yang optimal adalah tepat sasaran sesuai tingkat pendidikan, ketepatan waktu dan metode penyampaian atau komunikasi (Purnawati, 2019).
7	Kurniawan	Peran KPU Kota Surabaya Melalui Rumah Pintar Pemilu (RPP) Bung Tomo Dalam Pengembangan	KPU Kota Surabaya menyebut bahwa program Rumah Pintar Pemilu (RPP) adalah sebagai ladang informasi/edukasi bagi masyarakat

		Pendidikan Politik Masyarakat	tentang pemilihan dan demokrasi. Program ini dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat mulai dari remaja SMA sebagai pemilih pemula hingga para pekerja, buruh maupun kelompok masyarakat tertentu (M. I. Kurniawan, 2021).
8	Listiani	Upaya Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Sleman dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat	Program RPP merupakan bentuk upaya KPU Kabupaten Sleman dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Implementasi programnya mulai dari <i>KPU Goes to School/Campus, Talkshow</i> atau Sosialisasi Pendidikan Pemilih, serta membuka kunjungan ke Rumah Pintar Pemilu (Listiani, 2019).
9	Masputri, Rafni & Dewi	Upaya Kpu Kota Solok Menjadikan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik	Melalui program RPP, KPU Kota Solok telah melakukan enam upaya sebagai berikut: 1) Melakukan sosialisasi melalui selebaran poster dan radio; 2) Melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah; 3) Berkolaborasi dengan RT dan RW setempat untuk pengadaan sosialisasi pemilu; 4) Mengadakan kursus pemilihan; 5) Berkolaborasi dengan kampus setempat guna menjangkau mahasiswa; 6) Melibatkan guru PPKN (mata pelajaran sekolah) untuk mengajak siswa-siswinya berkunjung ke RPP yang bertempat di kantor KPU (Masputri et al., 2019).
10	Fitriyani & Faridh	Intervensi Komunitas Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah Pada Kelompok Marginal Piyungan Yogyakarta	Pemberdayaan pada kelompok marjinal Piyungan Yogyakarta oleh Komunitas Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah dengan menggunakan kombinasi model-model intervensi yang nantinya akan berpengaruh pada komponen strategi dasar, taktik, dan teknik pemberdayaan (Fitriyani & Faridh, 2021).
11	Hapsari, Yhupi & Septiarti	Identifikasi Potensi dan Pengembangan Program Pemberdayaan Komunitas	Pemberdayaan marjinal dilakukan melalui program-program seperti pelatihan keterampilan dan wirausaha yang dikemas secara



ke penerapan budaya, bukan ke arah pendidikan politiknya. Terlebih lagi, dalam 10 tahun terakhir belum ada penelitian yang membahas tentang pendidikan politik dari KPU kepada masyarakat kelompok marjinal. Padahal penelitian ini penting sekali dilakukan mengingatkan KPU memiliki kewajiban dalam mewujudkan kesadaran politik terhadap seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali, termasuk kelompok marjinal. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi *gap* penelitian dengan memfokuskan upaya pemberian pendidikan pemilih kepada pemilih marjinal oleh KPU Kabupaten Sleman.

## **1.6 Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan landasan yang berfungsi untuk merumuskan pertanyaan penelitian, merancang metode penelitian menginterpretasikan data serta menghasilkan temuan yang bermanfaat. Kerangka teori dapat disebut juga sebagai landasan teoritis yang digunakan untuk menghubungkan konsep, hubungan dan *variable* dalam penelitian, sehingga dapat mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi struktur dan dasar konseptual terhadap fenomena yang sedang diteliti (Dwi, 2023).

### **1.6.1 Pendidikan Politik dan Pemilih**

#### a) Definisi

Pendidikan politik terbagi menjadi dua suku kata, pendidikan merupakan bagian kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia seperti halnya sandang dan pangan. Sedangkan politik merupakan segala sikap atau aktifitas yang berhubungan dengan kekuasaan atau keputusan di lingkup negara dengan tujuan untuk memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Jika disatukan, maka pendidikan politik dapat dipahami sebagai strategi pendidikan yang dirancang negara untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang dicita-citakan. Selain itu, pendidikan politik juga dapat diartikan sebagai strategi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat agar tumbuh kesadaran dan pemikiran yang berorientasi pada politik. Sehingga nantinya mereka dapat berpartisipasi

secara maksimal dalam sistem politik sesuai paham kedaulatan rakyat dan demokrasi (Sarnoto, 2012).

b) Jenis-Jenis

Menurut (Kavang, 1998), pendidikan politik terbagi atas dua jenis, yaitu: a) Pendidikan politik yang bentuk dan prosesnya bersifat tersembunyi atau laten dimana aktivitasnya diadakan atau berlangsung dalam lembaga-lembaga non politis seperti lingkungan sosial dan keagamaan, lingkungan kerja, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah atau kampus; b) Pendidikan politis yang bentuk dan prosesnya bersifat terbuka dimana aktivitasnya diadakan atau berlangsung dalam lembaga politik tertentu (KPU, Bawaslu, Partai Politik serta lembaga pemilu lainnya).

c) Strategi

Secara umum, strategi merupakan sebuah perencanaan dalam mencapai suatu kemenangan atau tujuan tertentu. Perencanaan ini taktik konseptual yang merupakan seni dalam menggunakan dan mengembangkan kekuatan atau aspek seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan ideologi yang nantinya akan dimana melalui taktik operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, termasuk dalam tujuan politik. Strategi pendidikan politik merupakan tahapan awal dalam persiapan, perencanaan dan penyusunan langkah-langkah dalam menunjang pelaksanaan pendidikan politik.

Salah satu contohnya pada penelitian (Amalia, 2017), terdapat empat tahapan dalam strategi pendidikan politik yakni: 1) Riset, serangkaian kegiatan dalam mencari dan mengumpulkan data-data untuk menyusun program kerja; 2) Perencanaan, menetapkan langkah-langkah mulai dari pra, pelaksanaan hingga pasca program kerja; 3) Komunikasi, kemampuan penting dalam memberikan materi-materi mengenai informasi politik atau dapat disebut juga tahap pelaksanaan; 4) Evaluasi, mengukur tingkat efektivitas dan keberhasilan dari program, dimana jika terdapat kendala atau hambatan maka itu menjadi

acuan untuk perbaikan kedepannya. Selain itu, menurut (Suryanef & Rafni, 2020) strategi pendidikan politik juga dapat meliputi penyusunan atau perancangan pola pendidikan politik pada pemilih marjinal yang komprehensif, perangkat pembelajaran yang tepat untuk kursus pemilihan, SOP pendidikan politik pemilih marjinal, jaringan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, akses untuk semua pemilih marjinal, sistem evaluasi yang sedang berlangsung, dan kekhawatiran akan kebutuhan khusus pemilih marjinal.

#### d) Materi

Materi dalam pendidikan politik sangatlah luas, dimana biasanya bersinggungan dengan sistem dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut KBBI istilah materi dapat diartikan sebagai benda, bahan, segala sesuatu yang tampak atau sesuatu yang menjadi bahan (untuk dipikirkan, dibicarakan, dikarangkan, diujikan, dan sebagainya). Pada umumnya, materi yang disampaikan tidak terlalu teoritis akan tetapi lebih ke praktis serta berorientasi pada kesadaran hak dan kewajiban warga negara.

Menurut (Sumanto & Haryanti, 2021), materi pendidikan politik yang disampaikan di antaranya mulai dari konsep dan dasar politik, pengertian pendidikan politik, paradigma, fungsi dan tujuan pendidikan politik, sejarah pendidikan politik di Indonesia, sistem pemerintah dan demokrasi negara hingga hak asasi manusia. Adapun menurut (Suryanef & Rafni, 2020), materi-materi pendidikan politik meliputi hak dan tanggungjawab warga negara, fungsi pemilu dalam demokrasi bangsa, sistem dan rezim pemilu, menjadi pemilih cerdas, penyelenggara pemilu, pengawasan pemilu, dan pelanggaran pemilu.

#### e) Metode

Metode atau model pendidikan politik menurut (Imawan, 2004) dapat dilakukan melalui: 1) Lembaga pendidikan formal ataupun nonformal; 2) Asosiasi atau lembaga dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah; 3) Bahan bacaan seperti majalah, surat kabar dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasanya

membentuk pendapat umum; 4) Siaran televisi dan radio serta film (audio visual media). Selain itu, di era disrupsi ini dengan perkembangan teknologi dan digital yang masif, terdapat model pendidikan politik yang memanfaatkan media digital. Media dapat menjadi wadah pendistribusian informasi kepada khalayak banyak orang tanpa batas ruang dan waktu sehingga menjadi media promotive yang strategis, termasuk informasi mengenai politik. Selain dapat meningkatkan pemahaman politik, melalui media juga digunakan pelaku politik untuk membangun kepercayaan ataupun menumbuhkan keberpihakan pada pihak tertentu (Bashori, 2018).

Beragam metode dapat digunakan dalam memberikan pendidikan politik, namun metode yang paling ampuh bagi warga negara adalah metode non formal dibanding formal maupun informal. Pendidikan non formal merupakan bentuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang tidak terlalu kaku atau fleksibel serta berpotensi lebih menyenangkan dan dapat diterima oleh seluruh kalangan baik orang dewasa maupun anak-anak (Prayugo & Prayitno, 2022). Seperti metode yang diusungkan oleh (NurKhoirun, 1999) antara lain: 1) Bursa gagasan atau *brainstorming*; 2) *Buzz groups* atau diskusi dengan rekan samping kanan kirinya; 3) Studi kasus atau diskusi mengenai suatu fenomena; 4) Debat antara pemerintah dan oposisi; 5) Pengharapan atau penyampaian harapan-harapan dari partisipan; Dan 6) Diskusi terbuka yang membuat partisipan lebih leluasa dalam interupsi. Selain itu, adapun metode yang lebih variatif dan non formal yakni metode menurut (Suryanef & Rafni, 2020) di antaranya meliputi workshop, ceramah/diseminasi, focus group discussion (FGD), simulasi, permainan peran, kelompok sebaya, sesi film, dan seni/media tradisional.

## **1.6.2 Kelompok Marjinal**

### a) Definisi

Secara istilah, marjinal atau marginalisasi adalah suatu bentuk ketimpangan yang terjadi di dalam tatanan masyarakat baik dari segi sosial, pendidikan, ekonomi maupun politik oleh sekelompok masyarakat. Marginalisasi terjadi akibat banyaknya permasalahan-permasalahan kompleks yang kemudian menyebabkan masyarakat tersebut terpinggirkan oleh kondisi. Pada umumnya, kelompok marjinal memiliki posisi atau status yang paling rendah dalam masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok marjinal adalah istilah untuk kelompok yang selalu terkucilkan, terpinggirkan dari aktivitas masyarakat dan tidak bisa bersaing di kemajuan atau pembangunan suatu bangsa dan negara (Rahman, 2019).

b) Jenis-Jenis

Secara umum, mereka yang tergolong ke kelompok marjinal adalah anak jalanan, pengemis, orang miskin, para penyandang cacat atau disabilitas, gelandangan, kaum LGBT termasuk marjinal, masyarakat kolot atau tradisional, bahkan perempuan juga tergolong ke kelompok marjinal mengingat maraknya permasalahan kesetaraan gender. Selain itu, kelompok marjinal juga sering dikaitkan dengan masyarakat di Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) karena identic dengan masyarakat kaum buruh rendahan, kualitas SDM yang kurang serta orang yang tinggal di permukiman kumuh. Menurut (Wilson, 2010) Adapun karakteristik dari kelompok marjinal itu sendiri adalah sebagai berikut:

- Tinggal di lokasi terpencil, jauh dari sarana prasarana sosial ekonomi
- Berasal dari kaum minoritas (dari sisi agama maupun etnis)
- Tidak memiliki aset atau memiliki aset yang sangat rendah
- Memiliki jumlah tanggungan non-produktif yang banyak dan sumber pendapatan kecil

c) Masyarakat yang Rentan

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kelompok marjinal merupakan sekumpulan masyarakat yang rentan, dimana menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019, terjadinya kerentanan pada masyarakat diakibatkan oleh adanya suatu persoalan, kesulitan, gangguan atau hambatan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Kompleksivitas masalah yang dialami kelompok rentan biasanya merenggut beberapa hak seperti akses kebutuhan sehari-hari, akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, lingkungan hidup yang nyaman dan bersih, akses keadilan hukum serta pekerjaan dan upah yang layak (Sebayang, 2023). Salah satu hak yang direnggut yakni akses pendidikan, hal tersebut membuat kelompok marjinal menjadi minim kapasitas dan pemahaman ilmu, termasuk politik. Oleh karena itu, kurangnya pemahaman dan kapasitas politik membuat kelompok marjinal jadi rentan terlibat dalam praktik-praktik negatif yang menghambat demokrasi maupun pelaksanaan pemilu negara, salah satunya adalah politik uang (Dharmawan, 2013).

### **1.6.3 Kesadaran Politik**

#### a) Definisi

Kesadaran politik menurut (Surbakti, 2007) adalah kesadaran akan memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini mendorong seseorang harus memiliki pemahaman, minat dan perhatian tentang politik dan lingkungan masyarakat di suatu negara tempat ia hidup. Pendapat lainnya oleh (Fatwa, 2016) menyebut bahwa kesadaran politik merupakan kondisi tanggap seseorang karena mengerti akan hal wawasan politik, nilai-nilai politik, situasi dan kondisi problematika masyarakat hingga solusi dan keputusan untuk memecahkannya guna membawa perubahan yang baik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### b) Jenis-Jenis

Kesadaran didasarkan pada pandangan hidup atau keyakinan seseorang, dan menurut (Wijayanto et al., 2020), berikut jenis-jenis atau unsur-unsur yang meliputi kesadaran politik:

- Kesadaran individu yaitu seorang individu yang dapat menyikapi realita hidup dengan segala aspek maupun konsepsi sesuai dengan pandangan intelektual yang terbentuk pada dirinya.
- Kesadaran gerakan yaitu sekumpulan dari kesadaran-kesadaran individu yang memiliki cita-cita atau tujuan bersama hingga akhirnya membentuk organisasi atau gerakan agar bisa berkontribusi secara bersama-sama.
- Kesadaran atas problematika politik yaitu kesadaran akan persoalan, permasalahan, hambatan atau konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat karena merenggut kesejahteraannya.
- Kesadaran akan hakikat sikap politik yaitu kesadaran akan pentingnya memiliki sikap politis dimana individu tersebut menjadi sadar akan peristiwa atau masalah politik itu sendiri.

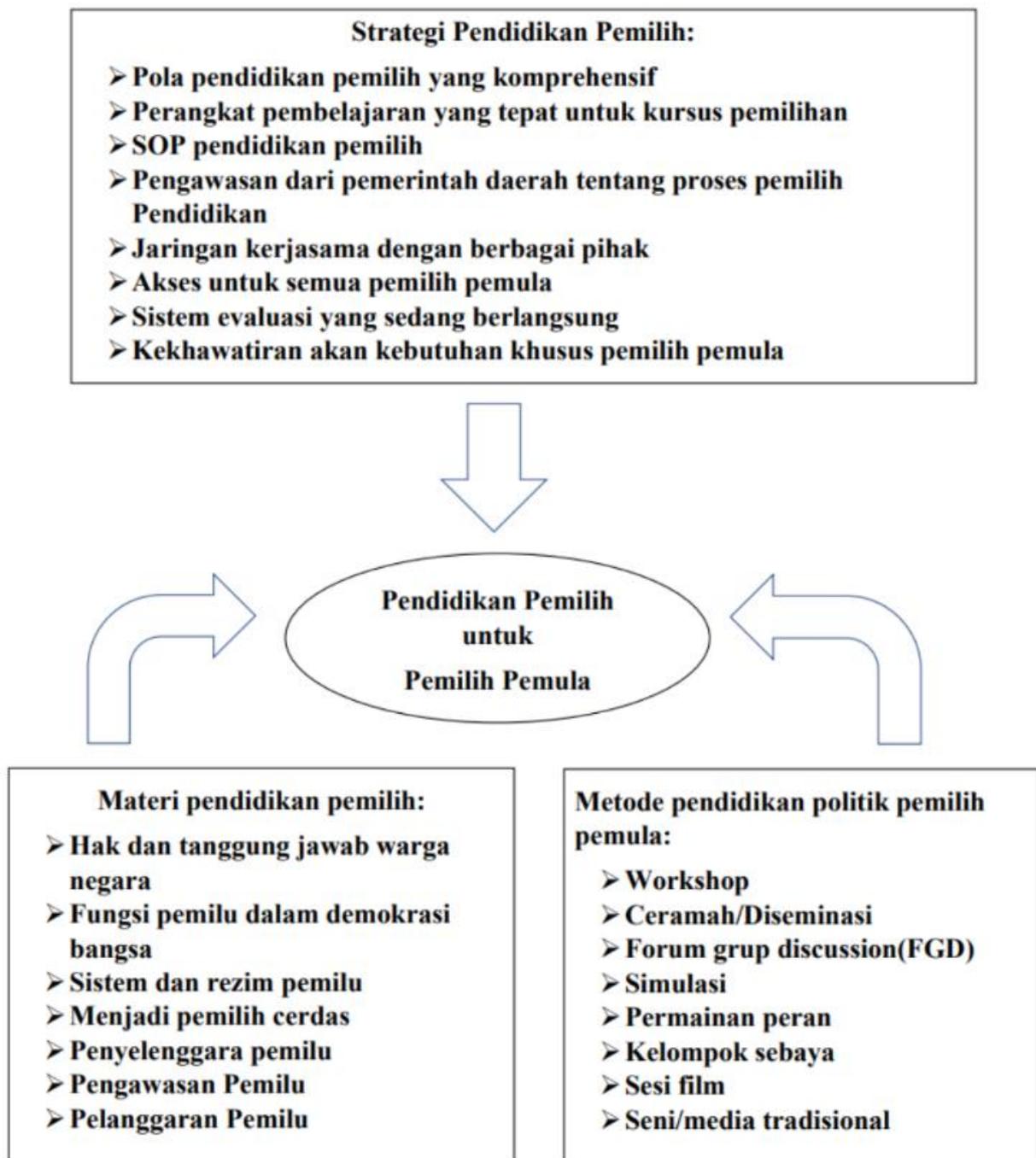
c) Pola

Menurut (Almond et al., 1990), terdapat empat pola kesadaran politik yakni:

- Kesadaran *input* adalah keadaan seseorang dengan sadar terlibat dalam sistem politik dan memberikan perhatian pada urusan-urusan pemerintah dan politik suatu negara.
- Kesadaran *output* adalah keadaan seseorang dengan sadar memahami dan merasakan dampak kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah dalam kehidupan bernegaranya.
- Penerimaan informasi politik adalah keadaan seseorang dimana telah menerima informasi mengenai politik di suatu negara. Contohnya adalah pejabat publik, partai politik dan nama-nama Menteri.

- Kebebasan berpendapat adalah keadaan seseorang dimana ia merasakan kebebasan untuk bisa mengutarakan atau menyampaikan aspirasi, pendapat, komentar maupun penilaian terhadap seluruh elemen yang terlibat pada sistem politik suatu negara.

Untuk memudahkan analisis data, penelitian menggunakan teori (Suryanef & Rafni, 2020) tentang model pendidikan pemilih pemula oleh relawan demokrasi yang nantinya akan didesain untuk kelompok marjinal. Terdapat tiga unsur pendidikan pemilih yakni meliputi strategi pendidikan pemilih, materi pendidikan pemilih, dan metode pendidikan politik pemilih. Kerangka teori penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.



**Gambar 2. Landasan Teori Penelitian**

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2023

Gambar diatas adalah unsur-unsur yang dijadikan model penelitian ini. Pertama, strategi yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih marjinal yang meliputi pola pendidikan politik pada pemilih marjinal yang komprehensif, perangkat pembelajaran yang tepat untuk kursus pemilihan, SOP pendidikan politik pemilih marjinal,

jaringan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, akses untuk semua pemilih marjinal, sistem evaluasi yang sedang berlangsung, dan kekhawatiran akan kebutuhan khusus pemilih marjinal. Kedua, memilih materi yang sesuai dengan pemilih marjinal yang meliputi hak dan tanggungjawab warga negara, fungsi pemilu dalam demokrasi bangsa, sistem dan rezim pemilu, menjadi pemilih cerdas, penyelenggara pemilu, pengawasan pemilu, dan pelanggaran pemilu. Ketiga, penentuan metode pendidikan politik yang tepat bagi pemilih marjinal yang meliputi workshop, ceramah/diseminasi, *focus group discussion* (FGD), simulasi, permainan peran, kelompok sebaya, sesi film, dan seni/media tradisional.

## **1.7 Definisi Konsepsional**

Definisi konsepsional adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi konsepsional dari masing-masing variabel, sebagai berikut:

### **1.7.1 Pendidikan Pemilih**

Pendidikan pemilih terbagi menjadi dua suku kata, pendidikan merupakan bagian kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia seperti halnya sandang dan pangan. Sedangkan pemilih merupakan segala sikap atau aktifitas yang berhubungan dengan kekuasaan atau keputusan di lingkup negara dengan tujuan untuk memberikan pengaruh terhadap masyarakat khususnya pada saat kegiatan pemilihan umum. Jika disatukan, maka pendidikan pemilih dapat dipahami sebagai strategi pendidikan yang dirancang negara untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang dicita-citakan. Selain itu, pendidikan pemilih juga dapat diartikan sebagai strategi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat agar tumbuh kesadaran dan pemikiran yang berorientasi pada politik. Sehingga nantinya mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politik sesuai paham kedaulatan rakyat khususnya pada pemilihan umum (Sarnoto, 2012).

### **1.7.2 Strategi Pendidikan Pemilih**

Strategi menurut teori (Antonio, 2001) adalah pendekatan secara keseluruhan yang meliputi gagasan atau ide, perencanaan serta implementasi atau eksekusi pada sebuah aktivitas dalam kurun tertentu. Di dalam strategi, pastinya harus tercipta hubungan komunikasi dan koordinasi tim kerja yang baik, memiliki tema besar, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung yang sesuai dengan gagasan atau yang disebut *grand design* secara rasional, rancangan anggaran biaya yang efisien serta langkah taktik untuk mencapai target-target yang telah direncanakan guna mencapai tujuan utama. Dalam konteks penelitian ini, KPU Kabupaten Sleman berupaya untuk mempersiapkan strategi-strategi apa saja yang digunakan dalam memberikan pendidikan politik bagi pemilih marjinal.

### **1.7.3 Materi Pendidikan Pemilih**

Dalam ilmu kimia yang dikutip dari *Encyclopedia Britannica*, materi adalah substansi material yang dapat diamati dan membentuk dasar dari semua fenomena di alam semesta (kumparan.com, 2023). Namun dalam konteks yang berbeda, menurut KBBI istilah materi dapat diartikan sebagai benda, bahan, segala sesuatu yang tampak atau sesuatu yang menjadi bahan (untuk dipikirkan, dibicarakan, dikarangkan, diujikan, dan sebagainya). Sedangkan dalam konteks penelitian ini, KPU Kabupaten Sleman berupaya untuk memillih dan merumuskan materi-materi pendidikan politik apa saja yang sekiranya tepat bagi pemilih marjinal.

### **1.7.4 Metode Pendidikan Pemilih**

Definisi metode menurut (Mustofa & Hamid, 2012) adalah rangkaian tindakan yang tersistematis yang biasanya dilakukan oleh pengajar atau guru dalam mengajar suatu materi pembelajaran. Metode merupakan proses atau cara yang digunakan dalam menyampaikan sebuah materi pembelajaran. Dengan adanya metode, maka dapat mempermudah dan mempercepat proses belajar menuju pemahaman. Dalam konteks penelitian ini, KPU

Kabupaten Sleman berupaya untuk memilih dan menentukan metode-metode apa saja yang tepat untuk digunakan dalam pendidikan politik pemilih marjinal.

### 1.8 Definisi Operasional

**Table 2. Definisi Operasional Landasan Teori**

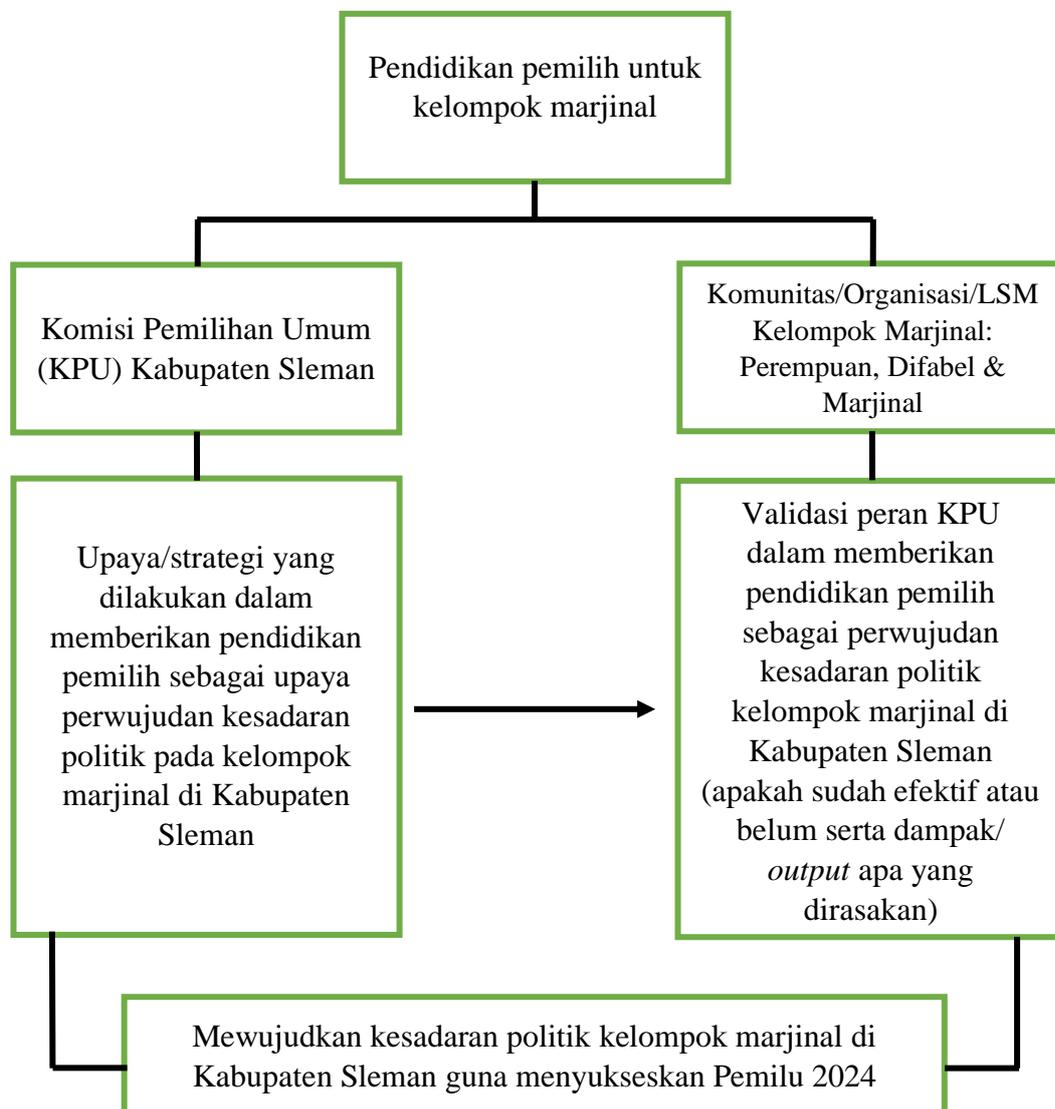
No	Landasan Teori	Variabel	Indikator	Parameter
1	Teori Model Pendidikan Pemilih (Suryanef & Rafni, 2020)	Strategi Pendidikan Pemilih	Pola pendidikan pemilih yang komprehensif	Paduan pendidikan pemilih yang diberikan jelas dan menyeluruh serta dapat diterima oleh masyarakat
			Perangkat pembelajaran yang tepat untuk kursus pemilihan	Perangkat pembelajaran dapat dipahami sekaligus digunakan dengan baik oleh masyarakat pada saat pendidikan pemilih berlangsung
			SOP pendidikan pemilih	SOP pendidikan pemilih yang telah dibuat dapat diimplementasikan dengan baik oleh pendidik maupun pemilih
			Pengawasan dari pemerintah daerah tentang proses pemilihan pendidikan	Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berpengaruh pada keberlangsungan dan kelancaran proses pendidikan pemilih
			Jaringan kerja sama dengan berbagai pihak	Terjalannya kolaborasi atau kerja sama antara pihak penyelenggara dengan mitra kolaborator
			Akses untuk semua pemilih	Dapat memberikan akses penuh baik secara informasi maupun fasilitas terhadap pemilih
			Sistem evaluasi yang sedang berlangsung	Sistem evaluasi yang diterapkan dapat betul-betul efektif dan berdampak pada pendidikan pemilih kedepannya
			Kekhawatiran akan kebutuhan khusus pemilih	Terakomodirnya kebutuhan atau fasilitas khusus pada saat pendidikan pemilih berlangsung

	Materi Pendidikan Pemilih	Hak dan tanggung jawab warga negara	Terwujudnya kesadaran untuk memenuhi hak dan tanggung jawab pemilih sebagai warga negara
		Fungsi pemilu dalam demokrasi bangsa	Terwujudnya pemahaman pemilih terhadap makna demokrasi dan fungsi pemilu pada suatu negara
		Sistem dan rezim pemilu	Terwujudnya pemahaman pemilih terhadap sistem pelaksanaan pemilu khususnya pada Tahun 2024
		Menjadi pemilih cerdas	Terwujudnya pemilih yang cerdas, dimana pemilih dapat mengikuti <i>step by step</i> dalam berpartisipasi politik pada pemilu mendatang
		Penyelenggara pemilu	Terwujudnya pengetahuan pemilih terhadap lembaga-lembaga penyelenggara pemilu
		Pengawasan pemilu	Terwujudnya pengetahuan pemilih terhadap lembaga pengawas pemilu, hal-hal yang perlu diawasi serta dapat turut berpartisipasi aktif sebagai pengawas juga dari masyarakat
		Pelanggaran pemilu	Terwujudnya pemahaman pemilih terhadap bentuk-bentuk pelanggaran pemilu
		Metode Pendidikan Pemilih	Workshop
		Ceramah/Diseminasi	Penyampaian materi oleh pendidik dengan pendekatan mendalam agar muncul kesadaran dari hati pemilih
		<i>Focus Group Discussion</i> (FGD)	Penyampaian materi oleh pendidik, dimana pendidik berperan sebagai fasilitator atau moderator yang akan memandu jalannya diskusi secara terarah
		Simulasi	Penyampaian materi oleh pendidik dengan proses peniruan pada suatu keadaan yang nyata
		Permainan peran	Penyampaian materi oleh pendidik yang dikemas dalam bentuk <i>role play</i> , dimana <i>role</i> tersebut nantinya dibagi secara

				rata kepada jumlah audiens (pemilih)
			Kelompok sebaya	Penyampaian materi oleh pendidik kepada pemilih, dan pemilih menyampaikan kembali ke teman/kelompok sebayanya
			Sesi film	Penyampaian materi oleh pendidik dengan alur menonton film terlebih dahulu baru penjelasan dari makna film yang telah ditonton oleh pemilih
			Seni/media tradisional	Penyampaian materi oleh pendidik melalui media alat-alat atau kesenian tradisional

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2023

### 1.9 Kerangka Berpikir



### **Gambar 3. Kerangka Berfikir Penelitian**

Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2023

Berdasarkan gambar di atas mengenai kerangka berfikir penelitian, menurut (Polancik, 2009) kerangka berfikir adalah suatu diagram yang menggambarkan alur logika dari topik atau fokus penelitian ini. Diagram ini akan memperlihatkan hubungan-hubungan dari variabel sehingga memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian hingga selesai. Dalam melaksanakan penelitian ini, terdapat dua stakeholder utama yakni KPU Kabupaten Sleman dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi maupun komunitas yang berfokus pada pemberdayaan kelompok marjinal khususnya perempuan, difabel dan waria di Kabupaten Sleman. Pertama-tama peneliti akan mendatangi KPU Kabupaten Sleman sebagai lembaga yang independen dan berwenang untuk memberikan sosialisasi atau pendidikan pemilih. Tujuannya untuk mendapatkan informasi mengenai upaya atau strategi apa saja yang sudah dilakukan oleh KPU dalam mewujudkan kesadaran politik pada kelompok marjinal.

Kemudian setelah itu, peneliti akan melakukan validasi kepada LSM terkait upaya yang diberikan KPU kepada kelompok marjinal. Hasil dari validasi ini dapat memunculkan tiga probabilitas yakni pertama, LSM terkait akan memberikan data berupa tanggapan/penilaian positif terhadap pendidikan pemilih yang telah diberi sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik tersebut berjalan efektif dan secara *output* dapat membangun kesadaran politik kelompok marjinal. Sedangkan probabilitas yang kedua, LSM terkait memberikan data berupa tanggapan/penilaian negatif terhadap pendidikan pemilih yang telah diberi sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan pemilih tersebut belum berjalan efektif dan secara *output* belum dapat membangun kesadaran politik kelompok marjinal. Sehingga, catatan tersebut nantinya akan menjadi referensi atau evaluasi bagi KPU. Kemudian, dapat memunculkan probabilitas campuran juga antara tanggapan/penilaian positif dan negatif sehingga ada hal-hal yang perlu dipertahankan dan yang perlu diperbaiki kedepannya.

Dari ketiga probabilitas di atas, hasil temuan penelitian ini pastinya akan memberikan luaran atau mencapai tujuan berupa pemecahan masalah mengenai “*Bagaimana model/upaya KPU Kabupaten Sleman dalam memberikan pendidikan pemilih terhadap kelompok marjinal?*”. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan manfaat secara teoritis yakni dapat memberikan bahan referensi dan evaluasi bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memaksimalkan pendidikan terhadap kelompok marjinal dan secara praktis dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik bagi masyarakat khususnya kelompok marjinal di Kabupaten Sleman.

## **1.10 Metode Penelitian**

### **1.10.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini memilih menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dimana menurut (Yusuf, 2014) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk menemukan suatu jawaban mengenai pengertian, makna, karakteristik, konsep, symbol, gejala, maupun deskripsi terhadap suatu fenomena atau kejadian. Metode tersebut biasanya berupa wawancara, observasi, dan penafsiran dokumen. Pemilihan metode kualitatif ini sangat cocok dengan fokus penelitian ini karena berkaitan dengan suatu fenomena atau kejadian sosial di lingkungan masyarakat yakni pendidikan politik terhadap kelompok masyarakat marjinal.

Sedangkan pendekatan studi kasus menurut (Rahardjo & Gudnanto, 2011) adalah suatu metode untuk memahami individu secara komprehensif dan integratif agar dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta yang dihadapinya. Studi kasus dalam konteks penelitian ini adalah kegiatan pendidikan politik yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sleman politik terhadap kelompok marjinal. Terlebih lagi, kegiatan pendidikan politik yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sleman merupakan studi kasus yang *trend center* atau anti-mainstream yang jarang terjadi bahkan ini pertama kalinya jika ditinjau dari penelitian terdahulu.

### **1.10.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah objek atau tempat untuk diadakan sebuah penelitian. Lokasi penelitiannya itu sendiri berada di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena alasan utama KPU Kabupaten Sleman yang menarik untuk diteliti terutama fenomena pendidikan politik yang telah diberikan memiliki jangkauan yang luas hingga kelompok marjinal. Selain itu, masyarakat marjinal di Kabupaten Sleman juga cukup beragam dan menarik untuk diteliti.

### **1.10.3 Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari tangan pertama sebagai informan kunci dalam penelitian, dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan teknik *purposive sampling* yang menentukan sampel riset dengan berbagai pertimbangan tertentu sehingga informasi yang diperoleh lebih representatif (Sugiyono, 2012).

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer, sehingga peneliti mendapatkannya secara tidak langsung karena melalui media perantara. Media perantara yang dimaksud meliputi artikel, berita, buku, dokumen resmi, dan sumber lainnya yang sudah ada (Indriantoro & Supomo, 2013).

### **1.10.4 Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Teknik wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan dari seorang narasumber yang sebelumnya terdapat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara mengenai suatu objek atau

fenomena secara sistematis (Bagus et al., 2016). Dalam konteks penelitian ini, tentu data yang terkumpul merupakan data primer dan teknik ini akan digunakan pada stakeholder utama yakni KPU Kabupaten Sleman untuk mengetahui model pendidikan politik yang diberikan pada kelompok marjinal guna mewujudkan kesadaran politik.

b. Studi Literatur

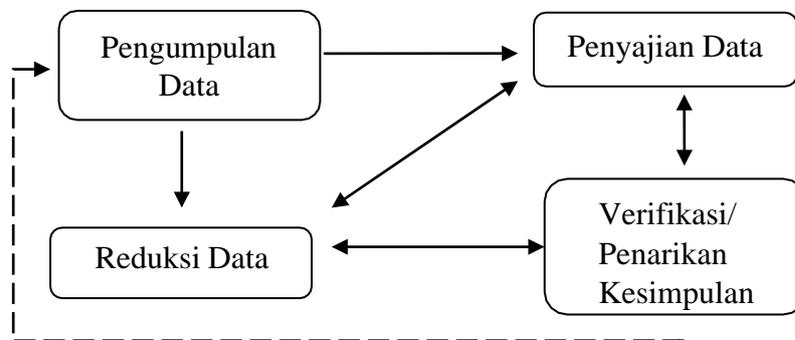
Studi literatur menurut (Daniel & Warsiah, 2009) merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan sejumlah dokumen-dokumen seperti buku, majalah maupun surat kabar yang berkaitan dengan fenomena dan fokus penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data yang terkumpul bersifat sekunder dan diperoleh artikel ilmiah, media massa yang relevan serta dokumen pendidikan politik yang disusun oleh KPU Kabupaten Sleman pada saat melaksanakan pendidikan politik terhadap kelompok marjinal pada Tahun 2014 yang berjudul “Model Pemilu 2014 Bagi Kaum Marjinal” yang ditulis oleh (Usman, 2014).

#### **1.10.5 Teknik Analisis Data**

Selanjutnya untuk analisis datanya sendiri peneliti menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang terjadi yang kemudian data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai fenomena atau masalah yang ada (Sugiyono, 2010). Selain itu, data berupa fakta-fakta yang disajikan juga didukung oleh analisis yang berasal dari perspektif peneliti, sehingga tidak semata-mata menguraikan melainkan juga memberikan penjelasan dan pemahaman secukupnya (Habsy, 2017). Adapun tahapan-tahapan dari analisis data yang peneliti lakukan mengacu pada teori (Milles & Huberman, 1992), yakni pertama adalah reduksi data. Reduksi data merupakan proses transformasi, pemilihan dan penyederhanaan data kasar yang didapat dari hasil pengumpulan di lapangan, dimana data tersebut berkaitan dengan model pendidikan politik yang diberikan KPU Kabupaten Sleman

terhadap kelompok marjinal serta efektivitas atau luaran dari pendidikan politik yang telah diberi kepada kelompok marjinal terhadap tingkat kesadaran politik mereka.

Kemudian yang kedua adalah penyajian data, dimana tahapan ini merupakan proses penggabungan data atau informasi yang tersusun dalam bentuk grafik, jenis matrik, began maupun jaringan yang terpadu dan mudah dipahami. Melalui penyajian data juga, peneliti dapat melihat dan memahami hasil data yang ada kemudian muncul kemungkinan adanya pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan, sehingga tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Tahapan ini bisa dibilang sebagai tahap pembuktian bagi seorang peneliti dapat melakukan verifikasi atas data-data yang telah ditemukan serta dapat betul-betul dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:



**Gambar 4. Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman**

Sumber: Diperoleh dari (Noor, 2015)